

Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Ancaman Intoleransi Beragama Terhadap Ketahanan Ideologi Pancasila Di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat

Otong Husni Taufiq

Universitas Galuh, Indonesia
email: otonghusnitaufiq@unigal.ac.id

Agus Budiman

Universitas Galuh, Indonesia
email: abuy.agus.budiman@gmail.com

Egi Nurholis

Universitas Galuh, Indonesia
email: eginurholis@gmail.com

Dikirim: 24-7-2024, Direvisi: 16-08-2024, Diterima: 31-8-2024

ABSTRACT

Indonesia is a pluralist country with various ethnicities, religions, cultures and languages. Diversity is a characteristic of Indonesia and is a wealth that must be maintained and preserved. But on the other hand, with so much diversity in Indonesia, it triggers an attitude of intolerance that can have an impact on social and state harmony. This research examines a phenomenon or case in detail and in depth using various data collection methods to understand reactions to certain events. This discussion uses a case study approach because this research only focuses on triggering the emergence of intolerant attitudes that affect the emergence of direct and indirect discrimination. The data collection techniques used in this research are observation, interview, and documentation. The observation method is a way of directly observing the research subject and observing in detail what activities are being carried out. The observation method is carried out by observing, detecting, and recording systematically the phenomena under study. Interviews were conducted using in-depth interview techniques, documentary research, and library research. Data analysis techniques in this research are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The absence of the principle of tolerance can cause various types of intolerance in society. Intolerance can have a negative impact on society, such as the division of the nation. Intolerance can cause social conflict in society, which can coexist with division. Overcoming intolerance requires comprehensive efforts from various stakeholders, including the government, society and educational institutions. The government must take steps to encourage social peace and penalise acts of intolerance to overcome the threat of intolerance against the Pancasila State Foundation in Indonesia, policies can be carried out in various ways and strategies.

Keywords: Policy, Intolerance, Pancasila, Ideological Resilience.

ABSTRAK

Indonesia adalah negara pluralis yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya dan bahasa. Keberagaman merupakan ciri khas Indonesia dan merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan. Namun di sisi lain



dengan banyaknya keragaman di Indonesia memicu adanya sikap intoleransi yang dapat berdampak pada kerukunan bermasyarakat dan bernegara. Penelitian ini mengkaji suatu fenomena atau kasus secara rinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk memahami reaksi terhadap peristiwa tertentu. Pembahasan ini menggunakan pendekatan studi kasus karena penelitian ini hanya fokus pada pemicu munculnya sikap intoleransi yang mempengaruhi munculnya diskriminasi secara langsung dan tidak langsung. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode observasi adalah suatu cara mengamati secara langsung subjek penelitian dan mengamati secara rinci kegiatan apa yang sedang dilakukan. Pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan cara mengamati, mendeteksi, dan mencatat secara sistematis fenomena yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam. Sumber data juga dilengkapi dengan penelitian dokumenter dan penelitian kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Tidak adanya prinsip toleransi dapat menyebabkan berbagai jenis intoleransi di masyarakat. Intoleransi dapat berdampak negatif pada masyarakat, seperti perpecahan bangsa sikap intoleransi dapat menyebabkan konflik sosial dalam masyarakat, yang dapat berdampak dengan perpecahan. Mengatasi intoleransi memerlukan upaya komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah untuk mendorong perdamaian sosial dan menghukum tindakan intoleransi yang mengancam ideologi Pancasila dengan berbagai cara dan strategi kebijakan.

Kata Kunci: Kebijakan, Intoleransi, Pancasila, Ketahanan Ideologi

PENGANTAR

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, di era modern ini, keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan dan ancaman, salah satunya adalah ancaman intoleransi. Intoleransi merupakan sikap tidak menghargai, tidak menerima, atau bahkan menolak perbedaan, baik perbedaan agama, suku, ras, maupun golongan.

Fenomena intoleransi di Indonesia semakin memprihatinkan, termasuk di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM RI, 2020) terjadi peningkatan kasus intoleransi di Kabupaten Ciamis pada tiga tahun terakhir, seperti pelarangan pendirian rumah ibadah, penyerangan terhadap kelompok minoritas, serta penyebaran kebencian melalui media social. Hal ini tentu menjadi ancaman serius terhadap nilai-nilai Pancasila, khususnya prinsip keadilan, persatuan, dan kemanusiaan.

Isu ketahanan ideologi Pancasila saat ini sedang menyita perhatian dan menjadi perdebatan di negara Indonesia. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai tema, gerakan menuju pembentukan negara berbasis agama, praktik pemahaman, dan perubahan ideologi dalam berbagai aspek kehidupan. Permasalahan ideologi membawa dampak yang sangat besar terutama pada ranah sosial bangsa dan negara (Budiman et al., 2022).

Permasalahan intoleransi di Kabupaten Ciamis perlu mendapat perhatian khusus, mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkan, seperti meningkatnya konflik sosial, disintegrasi bangsa, serta terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya komprehensif untuk menanggulangi ancaman intoleransi tersebut agar dapat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Indonesia adalah negara pluralis. Berbagai suku, agama, budaya dan bahasa hidup bersama dalam satu wilayah. Keberagaman tersebut merupakan ciri khas Indonesia dan merupakan kekayaan yang harus dijaga dan

dilestarikan dengan baik. Lebih lanjut, sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Salah satu cara untuk memenuhi kewajiban tersebut adalah dengan memperkuat semangat bela negara pada seluruh masyarakat Indonesia.

Di Indonesia, sikap terhadap kehidupan beragama dan keberagaman di atas terlihat jelas di mana-mana. Namun, belakangan ini, wajah agama nampaknya semakin memburuk. Agama-agama tidak hanya bisa mundur demi kepentingan politik pragmatis, tapi juga mulai berkonflik satu sama lain. Intoleransi beragama dan beragama merebak dimana-mana, dan suasana yang semula damai dan sejuk berubah total. Sikap toleran yang selama ini terjalin di kalangan umat beragama seakan hilang dari muka bumi dan digantikan oleh sikap intoleran yang penuh rasa tidak percaya dan saling merasa bersalah. Klaim-klaim yang paling benar telah menjadi pemandangan sehari-hari yang semakin padat, seolah semakin sulit dan rumit untuk diselesaikan Keberagaman agama, suku, budaya, dan bahasa yang ada di Indonesia menjadi kekhawatiran banyak kalangan, terutama terkait meningkatnya intoleransi dan kekerasan (Sanusi & Muhaemin, 2019).

Generasi muda sebagai penerus bangsa harus mempunyai ketahanan yang kuat terhadap ideologi Pancasila. Semakin kuat ketahanan ideologi Pancasila masyarakat, maka semakin kuat pula persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. (Wiratomo et al., 2022). Ketahanan ideologi merupakan hal yang sulit, mengingat ketahanan ideologi bukan hanya sekedar pemahaman, namun juga tentang kekuatan untuk menjunjung tinggi apa yang kita anggap sebagai prinsip panduan kita. Melalui ketahanan ideologi

Pancasila, pemuda mampu memahami secara utuh peran Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara, sumber hukum, dan arah atau pedoman kehidupan bermasyarakat.

Di era globalisasi, tantangan terhadap Pancasila semakin kompleks. Arus informasi yang begitu deras dan mudahnya akses terhadap berbagai ideologi asing dapat menggerus nilai-nilai Pancasila. Radikalisme, ekstremisme, individualisme, dan materialisme menjadi ancaman nyata bagi keutuhan bangsa. Perkembangan teknologi informasi yang pesat juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah masyarakat.

Isu-isu terkini terkait toleransi tidak bisa dianggap remeh belaka. Topik-topik yang memicu diskusi tentang toleransi biasanya mencakup perbedaan-perbedaan publikantara mayoritas dan minoritas, antara satu budayadengan budaya lain, dan antara satu agamadengan agama lainnya. Perbedaan cenderung dilihat sebagai penyebab semua masalah toleransi. Bencana intoleransi beragama di Indonesia juga dinilai wajar. Hal ini tidak dibahas secara rinci. Tujuh puluh tahun setelah Indonesia merdeka, ujaran kebencian, ekstremisme, terorisme, dan rasisme terus membentuk kehidupan masyarakat Indonesia.

Pada tahun 2020, berbagai fenomena intoleransi muncul. Warga Desa Lemba Tongoa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dihebohkan dengan pembunuhan sadis keluarga dan kebakaran gereja yang terjadi sekitar pukul 09. 00 WITA pada Jumat (27 November 2020).¹ Selain itu, masih terdapat kasus terkait intoleransi di Indonesia. Hariri Hasan, kepala penelitian SETARA Institute, mengatakan sejak 2007, pelanggaran

kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) serta intoleransi menjadi permasalahan terbesar di tingkat negara. Pada masa jabatan pertama Presiden Jokowi terdapat 846 kasus pelanggaran KBB dan dilakukan 1.060 tindakan. Sedangkan pada periode kedua terjadi 200 kasus pelanggaran KBB dan dilakukan 327 tindakan. Dari jumlah tindakan tersebut, 168 merupakan tindakan negara, dan 159 merupakan tindakan non-negara.

Tren intoleransi dan radikalisme cenderung meningkat dari waktu ke waktu di Indonesia, yang sebelumnya meningkat dari 46% menjadi 54%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, khususnya konflik politik, media sosial dan dipengaruhi oleh ceramah dan pidato yang mengandung ujaran kebencian di media (Maftuh Salam et al., 2022). Berikut daftar kota paling intoleran menurut Setara Institute pada 2023. Kota Depok, dengan skor 4,01 Kota Cilegon, dengan skor 4,19 Kota Banda Aceh, dengan skor 4,26. Artikel ini telah tayang dengan judul 10 Daftar Kota Paling Toleran dan Intoleran di Indonesia 2023 Versi Setara Institute (Amaranggana & Afifah, 2024).

Pada tahun 2010, Wahid Institute menerbitkan ulang laporan tersebut. Hasilnya mengecewakan. Kasus pelanggaran semakin meningkat. Jumlah pelanggaran meningkat dari 35 menjadi 63 kasus, dan dari 93 menjadi 133 kasus, yang berarti meningkat sebesar 30%. Berdasarkan analisis Wahid Institute, salah satu penyebabnya adalah kelalaian negara. Membaca data survei di atas mengenai keseluruhan isu intoleransi, ekstremisme dan terorisme, isu intoleransi (khususnya) di kalangan generasi muda Muslim merupakan isu agama dan nasional yang sangat serius. Ditambah lagi dengan permasalahan ekstremisme dan terorisme

di kalangan generasi muda, yang sebagian di antaranya justru meyakini bahwa mereka mendukung tindakan kekerasan atas nama agama. Sederhananya, berdasarkan survei di atas, generasi muda Indonesia setuju dengan adanya aksi teroris radikal yang mengatasnamakan agama (Qodir, 2018).

Seluruh instrumen hukum di atas menunjukkan bahwa konstruksi definisi dan justifikasi kebebasan beragama di Indonesia mendasarkan landasan hukumnya pada instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Universal Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Atas Dasar Agama atau Keyakinan dalam ICCPR 1981. Di dalam UUD 1945 terdapat pengakuan hak asasi manusia berdasarkan Pasal 27, 28, 29, 30 dan 31. Dokumen ini secara historis ditulis oleh Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin dengan mengacu pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Krisis kebebasan beragama di Indonesia (Samosir et al., 2022).

Masyarakat Indonesia saat ini menghadapi tantangan dari intoleransi agama karena meningkatnya akses terhadap media baru dan lembaga-lembaga tradisional, serta munculnya politisi Muslim konservatif yang menggunakan kantor-kantor negara untuk memajukan agenda-agenda keagamaan mereka (Hamayotsu, 2013). Umat Muslim Indonesia menunjukkan intoleransi terhadap non-Muslim, tetapi faktor-faktor seperti keterlibatan institusional, budaya Jawa, keterlibatan politik, dan nilai-nilai demokrasi dapat mengurangi intoleransi ini.

Ancaman intoleransi terhadap dasar negara Pancasila merupakan masalah serius yang dapat mengganggu keberlangsungan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Intoleransi dapat muncul dalam berbagai

bentuk, seperti sikap diskriminatif terhadap kelompok minoritas agama atau etnis, penyebaran pemahaman radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, serta politik identitas yang memecah-belah masyarakat. Salah satu ancaman utama intoleransi terhadap Pancasila adalah ekstremisme agama. Kelompok-kelompok ekstremis cenderung mempromosikan ideologi yang eksklusif dan tidak toleran terhadap keyakinan dan praktik keagamaan lainnya. Hal ini dapat mengancam prinsip kesetaraan dan persatuan yang menjadi nilai dasar Pancasila.

Ancaman intoleransi terhadap Dasar Nasional Pancasila merupakan fenomena yang mengkhawatirkan di masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara memuat lima sila yang menjadi landasan utama kehidupan berbangsa dan bernegara, namun dalam menghadapi tantangan yang mengancam nilai-nilai pluralisme, persatuan, dan kesatuan adalah hal yang biasa. Salah satu ancaman terbesar terhadap Pancasila adalah ekstremisme agama. Kebijakan tersebut harus mampu mempertimbangkan keberagaman masyarakat Indonesia, memperkuat pendidikan nilai-nilai Pancasila, dan mengedepankan dialog antaragama dan antarbudaya. Selain itu, sebagai bagian dari mengatasi intoleransi, kita juga harus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak minoritas.

Berdasarkan pengantar yang telah diutarakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana menyikapi dan strategi dalam upaya pencegahan sikap intoleransi di lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara khususnya di wilayah Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini mengkaji suatu fenomena atau kasus secara rinci dan mendalam dari segi waktu dan aktivitas (program,

proses, lembaga, atau kelompok sosial) dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk memahami reaksi terhadap peristiwa tertentu (Cresweell, 2016). Pembahasan ini menggunakan pendekatan studi kasus karena penelitian ini hanya fokus pada pemicu munculnya sikap intoleransi yang mempengaruhi munculnya diskriminasi langsung dan tidak langsung terhadap kelompok minoritas. dan dalam hal ini minoritas adalah kelompok Kristen yang berafiliasi dengan SARA (Etnis, Ras, Agama). Begitu pula dengan praktik-praktik intoleransi yang diakibatkan oleh konstruksi nilai-nilai moral yang menyimpang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode observasi adalah suatu cara mengamati secara langsung subjek penelitian dan mengamati secara rinci kegiatan apa yang sedang dilakukan. Tujuannya untuk memperoleh secara langsung data dan informasi mengenai praktik-praktik intoleransi yang muncul dari konstruksi nilai moral. Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati, mendeteksi, dan mencatat secara sistematis fenomena yang diteliti. Wawancara yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, penelitian dokumenter, dan penelitian kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Bentuk Ancaman Intoleransi

Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila adalah perekat keberagaman kita. Namun, dalam hubungan kekuasaan yang semakin kompleks, ancaman intoleransi semakin nyata

dan mengancam integritas nasional. Intoleransi tidak hanya menggerogoti nilai-nilai luhur Pancasila, namun juga dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Intoleransi dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti diskriminasi, kekerasan, dan ujaran kebencian. Ancaman ini semakin menguat dengan adanya pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan adanya kelompok-kelompok radikal yang berupaya menyebarkan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Toleransi adalah subjek yang sangat penting untuk penelitian sejarah dan sosial, dengan tingkat toleransi yang signifikan yang sudah ada di masyarakat jauh sebelum teori atau doktrin toleransi muncul (Crick, 1971) Upaya mengatasi ancaman intoleransi terhadap Pancasila merupakan salah satu prioritas utama pemerintah dan masyarakat Indonesia. Berbagai upaya dan strategi perlu dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang baik dan toleransi beragama, serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan tersebut antara lain pengembangan ketahanan ideologi daerah, keberagaman agama, dan pemahaman ketahanan nasional.

Beberapa bentuk ancaman intoleransi yang dapat menurunkan stabilitas ketahanan nasional yakni ekstremisme agama, politik identitas juga menjadi ancaman serius terhadap Pancasila. Penggunaan politik identitas untuk kepentingan tertentu dapat mengaburkan prinsip persatuan dalam keberagaman yang dianut oleh Pancasila. Hal ini dapat memperkuat pemisahan antar kelompok masyarakat dan merusak semangat gotong royong serta solidaritas nasional. Selain itu, diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama atau etnis juga menjadi bentuk intoleransi yang mengancam Pancasila. Serta,

tindakan diskriminatif seperti pembatasan hak-hak dasar, penolakan terhadap keberagaman, dan tindakan kekerasan dapat merusak semangat persatuan dalam keberagaman yang menjadi nilai Pancasila. Penyimpangan terhadap ideologi Pancasila juga dapat menjadi ancaman intoleransi. Interpretasi yang salah atau penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dapat mengancam kesepakatan nasional tentang landasan negara. Hal ini dapat merusak fondasi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu, radikalisme politik juga menjadi ancaman terhadap Pancasila.

Sikap radikal dalam politik, baik dari kalangan ekstrem kiri maupun kanan, dapat merusak semangat musyawarah dan konsensus yang menjadi salah satu prinsip Pancasila. Untuk mengatasi ancaman intoleransi terhadap Pancasila, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Pendidikan nilai-nilai Pancasila harus diperkuat untuk membangun kesadaran akan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Kelompok penganut ideologi ekstremis kerap menjadikan agama sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan sempitnya, tanpa mengindahkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman yang menjadi inti Pancasila. Selain itu, politik identitas juga menjadi ancaman serius bagi Pancasila. Penggunaan politik identitas yang bertujuan memperkuat kepentingan kelompok tertentu seringkali merusak semangat persatuan dan kesatuan yang merupakan nilai inti Pancasila.

Diskriminasi terhadap kelompok minoritas juga merupakan bentuk ancaman intoleransi terhadap Pancasila. Sikap diskriminatif terhadap kelompok etnis atau agama tertentu tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga dapat berdampak pada perdamaian sosial. Selain

faktor internal, faktor eksternal juga turut mempengaruhi resistensi terhadap Pancasila. Globalisasi membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat Indonesia. Salah satu dampak negatifnya adalah masuknya ideologi asing seperti radikalisme dan ekstremisme yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Melalui penelitian diketahui bahwa ancaman intoleransi terhadap Dasar Negara Pancasila berdampak pada ketahanan ideologi daerah sehingga menimbulkan sikap intoleransi terhadap suku dan agama. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan keberagaman agama dan membina masyarakat yang toleran terhadap perbedaan. Penerapan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 diperlukan untuk meningkatkan ketahanan ideologi daerah dan menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa. Selanjutnya, pembangunan ketahanan nasional harus dilaksanakan dengan pendekatan yang sesuai dengan konsep ketahanan nasional Indonesia, yang mencakup pengaturan dan pengelolaan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang dan harmonis pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang baik dan toleransi beragama, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu melakukan berbagai inisiatif dan strategi yang lebih konkrit. Melalui sinergi pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas lokal, penghijauan dapat dilaksanakan secara efektif untuk mengatasi ancaman intoleransi terhadap Dasar Pancasila.

Demokrasi Indonesia telah ditantang oleh meningkatnya intoleransi agama dan sikap diskriminatif dalam masyarakat sipil sejak pertengahan tahun 2000-an, meskipun ada kebebasan yang diperluas di berbagai bidang, termasuk media. Faktor yang berkontribusi pada meningkatnya pengaruh kelompok garis

keras/radikal dan meningkatnya intoleransi agama. Yang pertama adalah akses kelompok garis keras tidak hanya pada media baru tetapi, yang lebih penting, pada sarana dan institusi tradisional untuk mobilisasi agama dan politik, termasuk aparat negara, untuk menumbuhkan sentimen dan sikap antagonis terhadap apa yang mereka anggap sebagai musuh-musuh Islam di dalam komunitas Muslim sambil menyebarkan interpretasi Islam yang sempit dan dogmatis.

Intoleransi merupakan ancaman serius bagi semua agama. Sebab intoleransi tidak hanya melanggar HAM dan mencemari tempat ibadah, tapi juga melanggar hak setiap individu untuk beribadah sesuai keyakinannya. Intoleransi beragama seringkali jugaberujung pada kekerasan. Ideologi terakhir yang mengancam masyarakat beradab adalah eksklusivisme. Eksklusivisme menimbulkan ancaman serius bagi peradaban manusia karena eksklusivisme melemahkan akal sehat, menghalangi akal sehat, menghalangi dialog dan komunikasi, serta menghambat kemajuan dan kesejahteraan social (Manshur & Husni, 2020).

Hal lainnya adalah munculnya politisi Muslim konservatif di dalam negara yang siap dan bersemangat untuk merangkul media baru dan teknologi komunikasi sambil menggunakan jabatan dan hak prerogatif negara untuk memajukan visi dan agenda keagamaan konservatif. Untuk menilai bagaimana para politisi konservatif tersebut mengeksploitasi hak prerogatif kementerian dan perlindungan negara untuk membatasi masyarakat sipil, khususnya kebebasan berekspresi dan beragama.

Intoleransi terhadap SARA, demokrasi prosedural, ketimpangan reformasi birokrasi, perilaku korupsi yang persistem, dan penegakan hukum yang buruk adalah ancaman

keamanan lainnya di Indonesia. Sebagian besar ancaman terhadap intoleransi terhadap SARA adalah maraknya penolakan terhadap pemimpin yang berbeda keyakinan sebesar 58,4%. Setelah itu, beberapa calon kepala daerah melakukan politik identitas selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Jumlah kebebasan sipil sebesar 78,75 persen, hak-hak politik sebesar 72,49 persen, dan jumlah demonstrasi massa yang mengarah pada kekerasan sebesar 29,22 persen dari tahun 2015 hingga 2017 menunjukkan bahwa indeks demokrasi masih mengalami kesenjangan procedural (Mardhani, 2020)

Indonesia adalah negara yang beriman kepada Tuhan, sehingga agama dianut secara beradab, hubungan antar umat beragama dalam beribadah terjalin dengan baik, dan saling toleransi berlandaskan Tuhan. Pencapaian kebebasan beragama harus didasarkan pada tiga pilar: kebebasan, supremasi hukum, dan toleransi. Prinsip ini menyatakan bahwa tidak boleh ada dokumen hukum yang bertentangan, menolak, atau memusuhi agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Karsayuda & Tektona, 2021). Sejalan dengan pendapat (Daga, 2021) mengemukakan bahwa sangat penting untuk melakukan penelitian dan observasi untuk menentukan tingkat ancaman intoleransi terhadap Dasar Negara Pancasila dan dampaknya terhadap ketahanan ideologi wilayah. Toleransi antar umat beragama harus diselesaikan oleh pemerintah dan masyarakat melalui diskusi dan musyawarah dengan masyarakat. Untuk menjalankan dan mempertahankan Pancasila, orang harus menerapkan prinsip-prinsipnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti toleransi terhadap perbedaan agama

Kebebasan beragama di Indonesia diatur oleh negara, namun terlepas dari kerangka

hukum yang ada, intoleransi beragama masih menjadi masalah yang signifikan dalam politik dan masyarakat Indonesia (Lindsey & Pausacker, 2016). Sifat-sifat yang dapat ditemukan pada orang yang telah terdoktrin secara radikal adalah yang memungkinkan seseorang untuk menjadi teroris soliter. Jika sikap seseorang berubah menjadi tertutup, resisten, dan tidak toleran, itu cukup menjadi peringatan awal bahwa seseorang akan menjadi radikal dan berubah menjadi seorang iblis sendirian yang berbahaya. Meskipun tanda-tanda seperti itu tidak selalu membuat seseorang dianggap sebagai lone wolf terrorist, orang-orang di dekatnya harus mengawasi gerak-geriknya agar mereka dapat melaporkan kecurigaan tersebut (Jafar et al., 2019).

Terorisme dan radikalisme mempunyai keterkaitan yang erat, radikalisme sering kali menyerukan perubahan seluruh tatanan sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara praktis atau ekstrem yang dapat mengganggu kedaulatan suatu negara, yaitu pemahaman dan ekspresi. Landasan pemahaman radikalisme adalah fundamentalisme, yaitu radikalisme paham keagamaan suatu masyarakat, yang mengkonstruksi makna Salafisme radikal yang cenderung eksklusif dan ekstrim, sedangkan titik akhir dari radikalisme adalah terorisme. menggunakan. Sarana yang sah untuk mencapai tujuan tertentu. Atas nama agama atau ideologi.

Keterkaitan terorisme dan radikalisme memfasilitasi munculnya strategi yang efektif dan komprehensif untuk mencegah dan menanggulangi terorisme dan radikalisme. Untuk memerangi aksi terorisme dan ekstremisme, pemerintah Indonesia membentuk Badan Nasional Anti Terorisme. Departemen tersebut berperan sebagai Direktorat Utama Kegiatan Terorisme

sesuai PP Nomor 77 Tahun 2019 dan UU Nomor 5 Tahun 2018. Tentang Terorisme dan Ekstremisme Misi Anda adalah melakukan deradikalisasi. Namun, dinamisnya jumlah kejadian dan tersangka teroris di Indonesia memperjelas bahwa pemberantasan terorisme dan ekstremisme tidak dapat diserahkan kepada satu pihak saja (Prajogo et al., 2017)

Toleransi adalah sikap saling menghargai tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, budaya, kemampuan, atau penampilan. Intoleransi adalah kebalikannya. Salah satu konsekuensi negatif intoleransi adalah munculnya perpecahan nasional yang disebabkan oleh konflik sosial dalam masyarakat. Beberapa faktor dapat menyebabkan intoleransi, seperti status sosial, status ekonomi, kualitas pendidikan, informasi keagamaan dan fanatisme, dan politisasi agama.

Tidak adanya prinsip toleransi dapat menyebabkan berbagai jenis intoleransi di masyarakat. Intoleransi dapat berdampak negatif pada masyarakat, seperti: Perpecahan bangsa: Intoleransi dapat menyebabkan konflik sosial dalam masyarakat, yang dapat berdampak dengan perpecahan bangsa; Kesenjangan ekonomi: Intoleransi dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi pada masyarakat menengah ke bawah, yang mencakup hubungan sosial, kesejahteraan, dan kemakmuran. Pengurangan pendapatan: Intoleransi dapat menyebabkan kerugian fisik, materi, mental, atau kepribadian, yang dapat berdampak pada penurunan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan individu. Ancaman Kepribadian: Ancaman kepribadian dapat berasal dari intoleransi, yang dapat membuat masyarakat lebih tidak aman dan tidak terlindungi.

Pancasila Dalam Menangani Intoleransi

Dengan kondisi masyarakat yang pluralis ada beberapa tantangan yang dihadapi termasuk pada sikap intoleransi. Untuk mengatasi ancaman intoleransi terhadap Dasar Negara Pancasila di Indonesia, kebijakan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan strategi. Dalam menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama. Ini mencakup penerapan dan penguatan prinsip-prinsip Pancasila, pemahaman tentang kekuatan nasional dan cara organisasi keagamaan berpikir tentang ancaman intoleransi. Orang-orang Indonesia harus dapat mengatasi perbedaan dan menjadi orang yang toleran.

Pancasila, sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia, telah menjadi perekat bagi keberagaman yang begitu kaya di Nusantara. Lima sila yang terkandung di dalamnya telah menjadi pedoman hidup bangsa dalam membangun negara yang adil dan makmur. Namun, dalam dinamika zaman yang terus berubah, ketahanan ideologi Pancasila terus diuji oleh berbagai tantangan. Sejak kemerdekaan, Pancasila telah menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Percobaan untuk mengubah ideologi negara, pemberontakan, hingga pengaruh ideologi asing pernah menggoyahkan pondasi bangsa (Amanda et al., 2023). Namun, dengan semangat gotong royong dan kecintaan terhadap tanah discuss, bangsa Indonesia berhasil melewati berbagai cobaan tersebut. Pancasila terbukti menjadi benteng yang kokoh bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Dasar negara Pancasila, yang terdiri dari lima prinsip dasar memberikan inspirasi dalam membangun ketahanan nasional yang inklusif dan berkeadilan. Kelima, perkembangan ekonomi dan kesejahteraan

Untuk menghadapi ancaman intoleransi, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan diantaranya yakni Penguatan Pendidikan Karakter. Pendidikan karakter yang berbasis nilai-nilai Pancasila harus menjadi prioritas utama. Sekolah, keluarga, dan masyarakat harus bekerja sama dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan menghargai perbedaan sejak dini. Kemudian, penegakan hukum yang tegas dan juga pemerintah harus konsisten dalam menegakkan hukum terhadap segala bentuk tindakan intoleransi. Selanjutnya, hukum harus menjadi alat untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Serta sosialisasi nilai-nilai Pancasila harus terus dilakukan secara masif dan kreatif. Media massa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dapat berperan penting dalam menyebarkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat luas. Langkah selanjutnya yakni peningkatan literasi digital, masyarakat harus dibekali dengan literasi digital yang memadai agar dapat menyaring informasi yang benar dan tidak mudah terprovokasi oleh hoaks dan ujaran kebencian. Dialog antaragama dan antarbudaya: Dialog antaragama dan antarbudaya perlu terus dilakukan untuk memperkuat tali silaturahmi dan membangun toleransi antar umat beragama. Pemberdayaan Masyarakat, masyarakat harus diberdayakan untuk menjadi agen perubahan dalam mencegah dan menanggulangi intoleransi. Kerjasama antar lembaga, kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan media massa sangat penting dalam upaya menanggulangi intoleransi.

Pancasila bukan sekedar kumpulan prinsip, namun juga pedoman praktis

dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan Pancasila untuk mengatasi intoleransi memerlukan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, tokoh agama, lembaga pendidikan hingga masyarakat. Pemerintah harus menerapkan kebijakan yang mendukung nilai-nilai Pancasila, termasuk penuntutan yang adil terhadap tindakan intoleransi. Tokoh agama dan masyarakat mempunyai peranan penting dalam mengedepankan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati. Pendidikan juga menjadi kunci penanaman nilai-nilai Pancasila sejak dini. Kurikulum yang mengajarkan pentingnya toleransi, kerjasama dan menghargai perbedaan harus diterapkan di semua jenjang pendidikan. Dengan konsisten menerapkan nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat mengatasi ancaman intoleransi dan membangun masyarakat yang damai, harmonis, dan berkeadilan. Sebagai ideologi nasional, Pancasila memberikan solusi komprehensif untuk menjaga keharmonisan dan mempererat persatuan dalam keberagaman.

Pancasila dengan memiliki sikap toleransi. Garis depan sikap toleransi adalah sikap yang mengedepankan rasa hormat dan menghargai meskipun berbeda latar belakang. Menurut Pembukaan UUD 1945, Pancasila memiliki kedudukan yang tinggi dalam hukum. Setiap tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila dianggap tidak sah dan harus dihapus. Budaya bangsa juga menghasilkan Pancasila, yang harus diajarkan kepada generasi muda melalui pendidikan. Filosofi Pancasila berbeda dari filsafat lain dengan beberapa ciri. Pancasila tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari kehidupan bangsa, dan Sila Pancasila berfungsi sebagai satu kesatuan sistem yang utuh. Pancasila sebagai substansi, yang berarti unsur yang

permanen, asli, atau primer, dan sebagai suatu realitas, berarti bahwa Pancasila ada di dalam dan di dalam masyarakat Indonesia (Muid et al., 2022).

Pancasila mempromosikan kerukunan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Penggunaan pancasila dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari dapat membantu mengurangi intoleransi dan konflik agama. Namun, ada beberapa masalah yang harus diselesaikan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai pancasila serta memastikan bahwa prinsip-prinsip pancasila diterapkan secara efektif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Dengan berkembangnya globalisasi, perlu adanya penanaman nilai-nilai Pancasila untuk memantapkan karakter generasi muda agar nasionalisme sejalan dengan ideologi Pancasila.

Perkembangan teknologi di kalangan generasi muda diserap dengan cepat dan mudah sehingga memungkinkan mempengaruhi pengetahuan, sikap dan perilaku generasi muda khususnya generasi yang bertanggung jawab terhadap masa depan Indonesia. Dorongan untuk menjadi warga negara yang baik harus dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan saat ini. Mempertahankan perekonomian melalui kewirausahaan juga merupakan bagian dari bela negara, dan dalam menghadapi kemerosotan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat, penerapan Pancasila di kalangan generasi muda adalah kunci stabilitas politik Indonesia keruntuhan dapat dicegah. Mencegah berkembangnya tindakan korupsi di pemerintahan dan swasta, serta terjadinya aksi terorisme dan separatisme di wilayah Indonesia. di wilayah Indonesia dengan tujuan memperkuat ketahanan nasional. (Andhyka, 2023).

Dengan mendorong prinsip-prinsip yang mendorong kerukunan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keberagaman, Pancasila dapat membantu mengatasi intoleransi di Indonesia. Prinsip-prinsip yang mendorong keutuhan Republik Indonesia termasuk kesetaraan dan penghormatan terhadap keberagaman. Penggunaan Pancasila dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari dapat membantu mengurangi intoleransi dan konflik agama. Namun, untuk mengurangi intoleransi, perlu ada cara untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila serta memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila diterapkan secara efektif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat

Melalui pendekatan-pendekatan tersebut diharapkan risiko intoleransi terhadap Dasar-Dasar Pancasila dapat diminimalkan dan nilai-nilai Pancasila tetap dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam menangani ancaman intoleransi terhadap Dasar Negara Pancasila di Indonesia, kebijakan menggunakan berbagai metode dan strategi. Untuk mempromosikan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama. Ini mencakup penerapan dan penguatan nilai-nilai Pancasila, pemahaman tentang kekuatan nasional dan cara organisasi keagamaan berpikir tentang ancaman intoleransi. Orang-orang Indonesia harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perbedaan dan menjadi individu yang toleran terhadap perbedaan. Untuk mengetahui sejauh mana ancaman intoleransi terhadap

Dasar Negara Pancasila dan dampaknya terhadap ketahanan ideologi wilayah, penelitian dan observasi harus dilakukan. Toleransi antar umat beragama harus diselesaikan

oleh pemerintah dan masyarakat melalui pembicaraan dan musyawarah dengan orang-orang di sekitar mereka. Untuk menjalankan dan mempertahankan Pancasila, orang harus menerapkan prinsip-prinsipnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti menunjukkan toleransi terhadap perbedaan agama.

Ancaman Intoleransi Di Wilayah Ciamis Jawa Barat

Kabupaten Ciamis, dengan kekayaan budaya dan keberagaman masyarakatnya, sejatinya menjadi cerminan miniatur Indonesia. Namun, seperti halnya daerah lain di Indonesia, Ciamis juga tidak luput dari ancaman intoleransi yang dapat menggerogoti nilai-nilai luhur Pancasila. Beberapa faktor yang memicu tumbuhnya intoleransi di Ciamis antara lain: Radikalisasi seperti halnya pengaruh paham radikal yang disebar melalui media sosial dan jaringan tertentu dapat menggerakkan kelompok-kelompok kecil untuk melakukan tindakan intoleransi. Misinterpretasi agama pemahaman agama yang sempit dan literal dapat memicu sikap intoleran terhadap pemeluk agama lain. Konflik lokal dengan persaingan antar kelompok atau individu dapat memicu konflik horizontal yang bermuara pada tindakan intoleransi. Serta kurangnya pendidikan toleransi kurangnya pendidikan toleransi sejak dini dapat membuat generasi muda rentan terhadap pengaruh paham-paham intoleran.

Fenomena intoleransi di Indonesia semakin memprihatinkan, termasuk di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM RI, 2020) terjadi peningkatan kasus intoleransi di Kabupaten Ciamis pada tiga tahun terakhir, seperti pelarangan pendirian rumah ibadah, penyerangan terhadap

kelompok minoritas, serta penyebaran kebencian melalui media sosial Hal ini tentu menjadi ancaman serius terhadap nilai-nilai Pancasila, khususnya prinsip keadilan, persatuan, dan kemanusiaan.

Permasalahan intoleransi di Kabupaten Ciamis perlu mendapat perhatian khusus, mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkan, seperti meningkatnya konflik sosial, disintegrasi bangsa, serta terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya komprehensif untuk menanggulangi ancaman intoleransi tersebut agar dapat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Indonesia adalah negara pluralis. Berbagai suku, agama, budaya dan bahasa hidup bersama dalam satu wilayah. Keberagaman tersebut merupakan ciri khas Indonesia dan merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan dengan baik. Lebih lanjut, sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Salah satu cara untuk memenuhi kewajiban tersebut adalah dengan memperkuat semangat bela negara pada seluruh masyarakat Indonesia.

Ancaman Intoleransi di Wilayah Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat Kabupaten Ciamis, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, merupakan salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, suku, agama, dan adat istiadat. Keberagaman ini, meskipun menjadi salah satu kekayaan daerah, juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal menjaga toleransi antarumat beragama dan antar kelompok masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, ancaman intoleransi di Kabupaten Ciamis mulai terasa lebih nyata. Munculnya kelompok-kelompok tertentu

yang memiliki pandangan ekstrem dan radikal menjadi salah satu penyebab meningkatnya ketegangan di masyarakat. Kelompok-kelompok ini seringkali memaksakan pandangan mereka dan tidak segan-segan untuk melakukan tindakan yang dapat merusak kerukunan antarumat beragama. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya intoleransi adalah penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks melalui media sosial. Banyak warga yang terpengaruh oleh berita-berita palsu yang mengadu domba antar kelompok agama atau etnis.

Selain itu, pemahaman yang kurang mendalam tentang nilai-nilai kebhinekaan dan Pancasila juga turut memperburuk situasi. Kurangnya pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya toleransi dan hidup berdampingan dengan damai menjadi salah satu akar masalah yang harus segera diatasi. Pemerintah daerah Kabupaten Ciamis, bersama dengan berbagai elemen masyarakat, telah berupaya untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya dengan mengadakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat semangat kebersamaan dan toleransi antar umat beragama. Kegiatan seperti dialog lintas agama, workshop, dan seminar tentang pentingnya menjaga kerukunan seringkali diadakan. Selain itu, tokoh-tokoh agama setempat juga aktif dalam memberikan ceramah yang menekankan pentingnya sikap toleran dan saling menghormati. Meskipun demikian, upaya-upaya ini masih perlu ditingkatkan. Perlu adanya pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam menangani ancaman intoleransi. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan, baik formal maupun non-formal, yang menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini.

Kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah perlu diperkuat dengan materi-materi yang mengajarkan pentingnya hidup rukun dalam keberagaman. Selain itu, peran media juga sangat penting. Media massa harus lebih aktif dalam menyebarkan informasi yang akurat dan edukatif tentang pentingnya toleransi. Media sosial, yang seringkali menjadi sarana penyebaran hoaks, juga harus diawasi dengan lebih ketat. Masyarakat perlu diajak untuk lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi. Ancaman intoleransi di Kabupaten Ciamis memang nyata dan tidak bisa diabaikan. Namun, dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, tokoh agama, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat, ancaman ini bisa diatasi. Menjaga kerukunan dan toleransi bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Hanya dengan demikian, Kabupaten Ciamis dapat terus menjadi daerah yang damai dan harmonis dalam keberagaman.

Perkembangan ideologi Pancasila pada saat ini tengah menghadapi permasalahan pada aspek gejala sosial dan dinamika ideologi. Time saat ini menunjukkan adanya peningkatan kebebasan yang sangat beresiko dan dapat mengancam ketahanan ideologi. Beberapa faktor yang dapat melemahkan ketahanan ideologi Pancasila tersebut berawal dari realitas keberagaman, baik secara kebudayaan, suku, bahasa, dan agama. Hal tersebut diwujudkan dengan munculnya sikap-sikap intoleransi, primordialisme, dan sikap egoisme yang sangat besar terhadap sesama. Dalam konteks di Negara Indonesia, ancaman, tantangan, dan hambatan turut mengalami pergeseran. Ancaman dan hambatan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia bukan lagi seputaran agresi militer dan genjatan senjata antar negara, melainkan permasalahan saat ini

lebih terkait pada penjajahan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial-budaya (Rukmana et al., 2020)

Di Indonesia, sikap terhadap kehidupan beragama dan keberagaman di atasterlihat jelas di mana-mana. Namun, belakangan ini, wajah agama nampaknya semakin memburuk. Agama-agama tidak hanya bisa mundur demi kepentingan politik pragmatis, tapi juga mulai berkonflik satu sama lain. Intoleransi beragama dan beragama merebak dimana-mana, dan suasana yang semula damai dan sejuk berubah total. Sikap toleran yang selama ini terjalin di kalangan umat beragama seakan hilang dari muka bumi dan digantikan oleh sikap intoleran yang penuh rasa tidak percaya dan saling merasa bersalah. Klaim-klaim yang paling benar telah menjadi pandangan sehari-hari yang semakin padat, seolah semakin sulit dan rumit untuk diselesaikan Keberagaman agama, suku, budaya, dan bahasa yang ada di Indonesia menjadi kekhawatiran banyak kalangan, terutama terkait meningkatnya intoleransi dan kekerasan (Sanusi & Muhaemin, 2019)

Munculnya radikalisme dan aksi teroris sebagai akibat kekosongan nilai-nilai ideologi Pancasila dimulai pada awal tahun 2000-an, yakni peristiwa bom Bali 1 tahun 2002 yang dilakukan oleh Amrozi dan kawan-kawannya, pasca bom WTC di AS pada tahun 2001. Aksi teroris berikutnya adalah pengeboman Kedutaan Besar Australia, pengeboman Tanah Abang, pengeboman dan pembunuhan. Cirebon, Penembakan Polisi di Solo, serangan Teroris Kelompok Petinggi Noor Din M Top, serangan teroris kelompok Azhari dan Santoso, dan terakhir serangan teroris di Sarina Thamrin oleh kelompok Bahrin Naim pada awal tahun 2016.

Fenomena yang terjadi pasca tumbangnya pemerintahan Orde Baru dan dimulainya

era reformasi pada tahun 1998. Hapuskan kebijakan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan Anda. Kebijakan sosial dan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan ketahanan ideologi dalam rangka ketahanan nasional, kebijakan dan program penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pemberantasan radikalisme dan terorisme telah dikembangkan oleh berbagai pihak, yaitu. ini adalah program bersama yang melibatkan negara dan pemerintah. dan masyarakat. Oleh karena itu, program ini memerlukan sinergi dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan terkait. Ini sangat penting. Sebab permasalahan radikalisme dan terorisme bukan hanya menjadi ancaman dan tanggung jawab nasional, namun sudah menjadi ancaman kemanusiaan dan menjadi tanggung jawab kita semua untuk mengatasinya (Siagian, 2020).

Dinamika ideologi pada umumnya menghadapi gejala sosial dan masalah. Modernitas menunjukkan peningkatan kebebasan dan risiko untuk sikap hidup bangsa. Ada hal-hal yang dapat mengancam ketahanan ideologi, tetapi ada hal-hal yang menjadikannya kuat. Kebagaman kultural, etnis dan sub-etnis, bahasa, agama, dan kepercayaan adalah beberapa faktor yang menghambat ketahanan ideologi Pancasila. Sifat-sifat seperti intoleransi, primordialisme, stereotip, egositas, dan kurangnya empati terhadap sesama juga dipicu oleh media yang sering melemahkan suatu etnis dan memicu konflik yang disebabkan oleh interpretasi yang salah tentang masalah (Maharani et al., 2019).

Berikut adalah beberapa contoh kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia: Konflik antar agama: Konflik antar agama yang terjadi

di Indonesia, seperti konflik antar agama di Poso, Sulawesi Tengah, dan konflik antar agama di Lampung, Sumatera Selatan. Konflik antar keluarga: Konflik antar keluarga yang mengakibatkan kekerasan dan perang, seperti konflik antar keluarga di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Konflik antar kelompok etnis: Konflik antar kelompok etnis yang terjadi di Indonesia, seperti konflik antar kelompok etnis di Papua. Konflik politik: Konflik politik yang terjadi di Indonesia, seperti konflik politik di Aceh, Sumatera Utara. Konflik ekonomi: Konflik ekonomi yang terjadi di Indonesia, seperti konflik ekonomi di Bengkulu, Sumatera Selatan. Konflik sosial: Konflik sosial yang terjadi di Indonesia, seperti konflik sosial di Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat. Konflik religi: Konflik religi yang terjadi di Indonesia, seperti konflik religi di Lampung, Sumatera Selatan. Konflik politik-religion: Konflik politik-religion yang terjadi di Indonesia, seperti konflik politik-religion di Poso, Sulawesi Tengah. Konflik politik-ekonomi: Konflik politik-ekonomi yang terjadi di Indonesia, seperti konflik politik-ekonomi di Aceh, Sumatera Utara. Konflik politik-sosial: Konflik politik-sosial yang terjadi di Indonesia, seperti konflik politik-sosial di Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat.

Indonesia mempunyai ciri khas dan karakter bangsa sebagai negara multikultural yang mengedepankan sikap toleran. Format yang membedakan antara Indonesia dengan negara lain. Mengingat masyarakat Indonesia sangat beragam, maka toleransi di Indonesia menjadi kunci terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar keharmonisan hidup di Indonesia tetap terjaga dan terjaga. Karena persatuan masyarakat Indonesia yang majemuk merupakan cita-cita para pahlawan

dan bangsa Indonesia, maka setiap masyarakat harus mampu mendidik keturunannya untuk mengamalkan nilai-nilai .

Inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah ketekunan dan keuletan nasional, termasuk kemampuan mengembangkan kemampuan nasional untuk mencapai tujuan nasional dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan bangsa. Inti dari konsep ketahanan nasional Indonesia adalah pengaturan dan penegakan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang dan harmonis dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Keberhasilan penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam pemberantasan radikalisme dan terorisme akan memperkuat ketahanan bangsa. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diterima sebagai kebenaran oleh masyarakat Indonesia, diinternalisasikan dan diamalkan dalam perilaku masyarakat sehari-hari, serta efektif menolak dan menghalangi potensi munculnya radikalisme dan terorisme Sami. Ideologi Pancasila dan kekuatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan ideal dan konstitusional diharapkan mampu mencegah masuknya ideologi ekstremis dan aksi terorisme yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Sikap yang sangat baik ini dilakukan oleh salah seorang Ulama, yakni KH Wahid Hasyim, putra pendiri Jamiyah NU KH Hashim Asyari dan seorang ulama muda NU. Pada hakikatnya, penghapusan tujuh kata prinsip Ketuhanan tidak ada pengaruhnya, karena “iman kepada Tuhan Yang Maha Esa” sebenarnya adalah konsep monoteistik Islam. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi umat Islam untuk

menolak konsep Pancasila. Artinya dengan konsep ini umat Islam berhak menjalankan keyakinan agamanya tanpa diskriminasi terhadap keyakinan agama lain. Saat ini pemberlakuan Pancasila berarti syariat Islam diamalkan dalam kerangka konsep kehidupan berbangsa dan kehidupan berbangsa. Semoga tidak ada lagi intoleransi terhadap kehidupan berbangsa yang mengatasnamakan suku, agama, dan sebagainya.

Kebijakan Pemerintah Ciamis dalam Menanggulangi Intoleransi untuk Ketahanan Ideologi

Untuk mengatasi intoleransi, pendidikan dan penerapan toleransi serta perlakuan yang adil dan berdasarkan hukum harus dilakukan. Intoleransi berdampak negatif pada banyak aspek kehidupan sosial, politik, dan budaya. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh individu atau kelompok yang terkena dampak intoleransi, namun juga masyarakat secara keseluruhan. Salah satu dampak utama intoleransi adalah hancurnya kedamaian sosial dan timbul konflik antar individu atau kelompok. Intoleransi juga dapat menimbulkan polarisasi sosial, dimana perbedaan pendapat dan keyakinan dijadikan alasan untuk menjauhkan diri dari kelompok lain. Hal ini dapat menghambat proses dialog, konsultasi dan kerja sama antar masyarakat. Selain itu, intoleransi juga dapat menghambat perkembangan demokrasi yang inklusif dan partisipatif.

Upaya untuk mewujudkan kerukunan hidup beragama Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui kebijakannya membuat suatu kampung toleransi yang bernama Kampung Kerukunan. (Sabandar, 2023) Kampung Kerukunan di Ciamis sebagai sebuah contoh nyata bagaimana masyarakat yang berbeda-

beda agama dapat hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Kampung Kerukunan Ciamis menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan toleran. Keberadaan kampung ini membuktikan bahwa perbedaan agama bukanlah penghalang untuk hidup rukun dan saling menghormati. Sejalan dengan pendapat (Sumadi, 2024) mengungkapkan bahwa Kampung Kerukunan yang terletak di Ciamis, Jawa Barat. Kampung ini menjadi sorotan karena menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang agama dapat hidup berdampingan secara harmonis dan saling menghormati. Masyarakat Kampung Kerukunan terdiri dari beragam pemeluk agama, namun mereka mampu hidup rukun dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Kampung Kerukunan secara resmi diresmikan oleh Bupati Ciamis pada tanggal 21 April 2022. Peresmian ini bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai leluhur yang menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan. Kampung Kerukunan Ciamis adalah bukti nyata bahwa keberagaman agama bukanlah penghalang untuk hidup rukun dan damai. Keberadaan kampung ini menginspirasi kita semua untuk terus membangun masyarakat yang inklusif dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Ideologi-ideologi tersebut seringkali mengancam keberagaman dan toleransi masyarakat Indonesia. Pendidikan juga menjadi kunci dalam mengatasi intoleransi yang membayangi Pancasila. Pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila sejak dini dapat membentuk karakter generasi muda yang toleran dan menghargai perbedaan. Selain itu, penguatan dialog antaragama dan antarbudaya juga harus semakin diperkuat untuk menciptakan

perdamaian dan kerukunan dalam masyarakat. Sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk jati diri dan karakter bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi ideologi nasional tetapi juga menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara yang mencerminkan nilai-nilai gotong royong, persatuan, keberagaman, demokrasi, dan keadilan sosial. Namun, dalam beberapa tahun terakhir.

Indonesia menghadapi tantangan serius terhadap nilai-nilai Pancasila akibat semakin besarnya ancaman intoleransi. Ancaman intoleransi terhadap Pancasila disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain ekstremisme agama, politik identitas, diskriminasi etnis dan agama, serta pengaruh ideologi asing. Kelompok ekstremis agama kerap menjadikan agama sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan politik, tanpa memperhatikan nilai-nilai toleransi dan keberagaman yang terkandung dalam Pancasila. Selain itu, politik identitas juga menjadi faktor penting yang mengancam kelangsungan Pancasila. Dalam Pancasila, kelompok tertentu menggunakan identitas suku, agama, dan budaya untuk memajukan kepentingan kelompoknya sendiri tanpa menghormati prinsip persatuan Pancasila.

Selain faktor internal, faktor eksternal juga turut mempengaruhi resistensi terhadap Pancasila. Globalisasi memberikan dampak positif dan negatif bagi Indonesia, dan masuknya ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti radikalisme dan ekstremisme, memberikan ancaman serius terhadap keberagaman dan toleransi masyarakat Indonesia. Mengatasi ancaman intoleransi terhadap Pancasila memerlukan upaya yang tepat dan efektif dari pemerintah.

Beberapa pengamat melihat dinamika kehidupan sosial dan politik pasca reformasi bukan hanya sebagai transisi rezim dan kebebasan berpolitik, tetapi juga perkembangan pergeseran dalam fitur-fitur hubungan antara negara dan masyarakat. Setiap program politik memiliki ideologi, tetapi mengabaikan program-program yang ditujukan untuk pemeliharaan dan transformasi sosial. Ideologi terkait erat dengan pembenaran atas hubungan kekuasaan yang tidak seimbang. Dalam upaya untuk menerjemahkan pemahaman fungsional dan struktural dari ideologi, konsep ketahanan ideologi dibentuk. Sebuah sistem pandangan mengenai kebaikan bersama atau masyarakat dan negara yang ideal secara operasional disebut sebagai ideologi. Sementara itu, secara krusial ideologi merupakan kerangka penjelasan atas setiap kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh penguasa, termasuk di dalamnya konsep-konsep dan rumusan-rumusan politik (Danugroho & Halimatus, 2022).

Proses demokrasi berada dalam risiko ketika masyarakat gagal menghormati perbedaan dan memperlakukan semua orang dengan adil. Intoleransi juga dapat menghambat perkembangan budaya dan seni, karena masyarakat takut untuk mengekspresikan diri secara bebas tanpa takut diejek atau diserang oleh kelompok intoleran. Akar penyebab intoleransi adalah kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan. Sikap intoleransi terjadi ketika individu atau kelompok merasa superior atau eksklusif terhadap kelompok lain. Selain itu, faktor eksternal seperti politik identitas, ekonomi, dan agama juga dapat memperkuat sikap intoleransi di masyarakat.

Pemahaman mengenai ketahanan ideologi Pancasila gagasan yang diungkapkan

oleh (Rizki et al., n.d.) Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana menyusun kebijakan pengembangan pemikiran Pancasila dalam rangka penguatan ketahanan nasional dari sudut pandang manajemen, berdasarkan uraian pengembangan pemikiran Pancasila yang telah dijelaskan pada latar belakang. Ketahanan nasional Indonesia merupakan keadaan dinamis bangsa Indonesia yang mencakup seluruh aspek kehidupan nasional secara terpadu yang mencakup keuletan dan ketangguhan. Hal ini mencakup kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan eksternal. dan dari dalam menjamin jati diri bangsa dan negara, keutuhan, kelangsungan hidup dan perjuangan mencapai tujuan nasional.

Politik identitas yang mengutamakan kepentingan kelompok tertentu dapat menimbulkan konflik intoleransi antar kelompok. Pendidikan yang tidak memperhatikan nilai-nilai toleransi juga menjadi penyebab utama terjadinya intoleransi. Ketika pendidikan hanya menekankan keunggulan kelompok atau keyakinan tertentu, maka akan menimbulkan sikap intoleransi terhadap kelompok dan keyakinan lain. Oleh karena itu, pendidikan yang meneguhkan nilai-nilai toleransi dan mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan sangat penting untuk mencegah intoleransi. Mengatasi intoleransi memerlukan upaya komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk mendorong perdamaian sosial dan menghukum intoleransi.

Membangun saling pengertian mengharuskan masyarakat untuk terlibat dalam proses dialog dan konsultasi. Sementara

itu, lembaga pendidikan perlu meningkatkan pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai toleransi dan menghargai perbedaan. Upaya bersama ini diharapkan mampu membuat masyarakat bisa hidup rukun tanpa terpengaruh intoleransi. Hubungan antara ketahanan nasional dengan ideologi Pancasila memang menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Salah satu elemen penting untuk mencapai ketahanan nasional adalah ketahanan ideologi, dalam hal ini Pancasila. Ketahanan nasional mengandung prinsip dasar pengejawantahan Pancasila dalam segenap aspek kehidupan nasional Perwujudan nyata yang dapat dilakukan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dalam berbagai macam bentuk, secara formal tentu dimasukkan dalam setiap peraturan. Pancasila dapat dimasukkan dalam setiap pembelajaran di sekolah dan lainnya sehingga dapat teraktualisasikan dengan nyata. Perkembangan period Society 5.0 tersebut tentunya membawa dampak yang signifikan bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari sosial, ekonomi, politik bahkan ideologi. Perkembangan tersebut tentunya akan membawa pemahaman serta nilai-nilai baru yang sedikit banyak akan mempengaruhi nilai-nilai dan budaya yang telah melekat pada kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini yang akhirnya harus menjadi perhatian dan kewaspadaan kita bersama dalam upaya mewujudkan ketahanan nasional. Apalagi ketahanan nasional erat kaitannya dengan ketahanan ideologi dalam hal ini Pancasila (Yunas et al., 2023).

Dalam beberapa kasus, intoleransi dilakukan dengan cara yang sangat halus, melalui kebijakan pemerintah yang tidak memberikan akses yang sama terhadap kelompok minoritas atau mereka yang

dianggap menyimpang. Fakta ini merupakan bentuk diskriminasi dan dapat menimbulkan rasa sakit hati dan ketakutan, terutama di kalangan mereka yang dianggap "kelompok menyimpang" dan tidak memiliki akses yang setara terhadap. Dehumanisasi adalah salah satu bentuk intoleransi. Manusia, makhluk mulia dan terhormat yang diciptakan Tuhan pada tahun, dirusak oleh isolasi sosial yang dilakukan oleh kelompok tertentu pada tahun. Dehumanisasi terjadi karena adanya cara pandang hegemonik yang diciptakan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas.

Di masa lalu, kediktatoran sering kali melanggar hak-hak sipil, politik, dan ekonomi. Namun, dalam pemerintahan yang dipilih secara demokratis, represi terbuka terjadi karena pemerintah takut akan tekanan dari "mayoritas" dan citra serta perhitungan politik sering kali dikedepankan. Penyerangan dan pembunuhan merupakan salah satu tindakan intoleransi yang paling mengerikan. Sebab, intoleransi berubah menjadi tindakan yang bisa berujung pada pelanggaran HAM. Serangan dan pembunuhan biasanya terjadi karena lemahnya penegakan hukum dan dukungan negara terhadap kelompok yang secara ideologi tidak toleran.

Pada tahap ini, intoleransi menjadi ancaman yang sangat serius karena menimbulkan rasa tidak aman pada kelompok lain, terutama para korban. Salah satu bentuk pembunuhan massal yang paling sering terjadi selama satu dekade terakhir adalah terorisme. Dalam setiap serangan teroris, selalu ada korban yang meninggalkan rasa takut, cemas, dan cemas. Apa yang dilakukan rezim Nazi terhadap kaum Yahudi di Jerman merupakan bentuk penghapusan identitas. Tindakan ini merupakan bentuk intoleransi yang paling

buruk karena menimbulkan luka jangka panjang bagi korbannya (Aziz, 2016).

SIMPULAN

Untuk mengatasi ancaman intoleransi terhadap Dasar Negara Pancasila di Indonesia, kebijakan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan strategi. Intoleransi dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti sikap diskriminatif terhadap kelompok minoritas agama atau etnis, penyebaran pemahaman radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, serta politik identitas yang memecah-belah masyarakat. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara memuat lima sila yang menjadi landasan utama kehidupan berbangsa dan bernegara, namun dalam menghadapi tantangan yang mengancam nilai-nilai pluralisme, persatuan, dan kesatuan adalah hal yang biasa.

Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki kemampuan untuk terus berkembang dan relevan dengan dinamika zaman. Dengan terus merawat dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menghadapi berbagai tantangan yang ada dan memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Kelompok penganut ideologi ekstremis kerap menjadikan agama sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan sempitnya, tanpa mengindahkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman yang menjadi inti Pancasila. Sikap diskriminatif terhadap kelompok etnis atau agama tertentu tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga dapat berdampak pada perdamaian sosial. Globalisasi memberikan dampak positif dan negatif bagi Indonesia, dan masuknya ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti radikalisme

dan ekstremisme, memberikan ancaman serius terhadap keberagaman dan toleransi masyarakat Indonesia.

Berbagai upaya dan strategi perlu dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang baik dan toleransi beragama, serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mewujudkan masyarakat yang baik dan toleransi beragama, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu melakukan berbagai inisiatif dan strategi yang lebih konkrit. Keberhasilan penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam pemberantasan radikalisme dan terorisme akan memperkuat ketahanan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, M. D., Metalin, A., Puspita, I., Imanda, F. A., Maulana, R., & Santoso, G. (2023). Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT) Kontribusi Masyarakat dalam Perspektif Ketahanan Nasional Indonesia di Era Digital Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT). *Jurnal Pendidikan ...*, 02(03), 45–63. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/1049%0Ahttps://jupetra.org/index.php/jpt/article/download/1049/360>
- Amaranggana, L. P., & Afifah, M. N. (2024). 10 Daftar Kota Paling Toleran dan Intoleran di Indonesia 2023 Versi Setara Institute. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/01/31/083000065/10-Daftar-Kota-Paling-Toleran-Dan-Intoleran-Di-Indonesia-2023-Versi-Setara>.
- Andhyka, B. (2023). Internalization of Pancasila: an Overview Economic and Political Stability in an Effort To Strengthen National Resilience. *Jurnal Aktualisasi Pancasila*, 1(1), 1–8.
- Aziz, A. (2016). Memperkuat Kebijakan Negara dalam Penanggulangan Radikalisme di Lembaga Pendidikan. *HIKMAH Journal of Islamic Studies*, XII(1), 29–56.
- Budiman, A., Taufiq, O. H., & Nurholis, E. (2022). Ancaman Intoleransi Terhadap Dasar Negara Pancasila Dan Implikasinya. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(3), 375. <http://jurnal.ugm.ac.id/JKN>
- Cresweell. (2016). *Research desaign: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Penerjemah Ahmad Fawaid & Rianayati Kusmini. Pustaka Belajar.
- Crick, B. (1971). Toleration and Tolerance in Theory and Practice on JSTOR. *Government and Opposition*, 6(2), 143–171. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.1971.tb01214.x>
- Daga, Y. (2021). Bencana Intoleransi Antarumat Beragama Dalam Ruang Publik Indonesia. *Agiornamento: Jurnal Filsafat-Teologi Kontekstual*, 2(1), 33–44.
- Danugroho, A., & Halimatus, A. (2022). Worldview and Pancasila : Meanings in Building the Resilience of the Nation ’ s Ideology. *Commemorating the 100th Anniversary of Taman Sari, 2001*, 102–106.
- Hamayotsu, K. (2013). The Limits of Civil Society in Democratic Indonesia: Media Freedom and Religious Intolerance. *Journal of Contemporary Asia*, 43(4), 658–677. <https://doi.org/10.1080/00472336.2013.780471>

- Jafar, T. F., Sudirman, A., & Rifawan, A. (2019). Ketahanan Nasional Menghadapi Ancaman Lone Wolf Terrorism Di Jawa Barat. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(1), 73. <https://doi.org/10.22146/jkn.41244>
- Karsayuda, H. . R., & Tektona, R. I. (2021). Ketahanan Ideologi Pancasila Dalam Menghadapi Distrupsi Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(1), 112. <https://doi.org/10.22146/jkn.65002>
- Komnas HAM RI. (2020). *Laporan Tahunan Komnas HAM 2019*.
- Lindsey, T., & Pausacker, H. (2016). *Religion, law, and intolerance in Indonesia*. <https://www.routledge.com/Religion-Law-and-Intolerance-in-Indonesia/Lindsey-Pausacker/p/book/9781138477285>
- Maftuh Salam, Ulfiyah, Didin Wahidin, & Ujang Nurjaman. (2022). Strategies to Build Students' Moderate Attitude Through the Cultivation of Ahlusunnah Values Waljamaah Annahdliyah (Descriptive study at SMP Plus Maarif NU Ciamis and SMP Plus Maarif NU Pangandaran). *IJGIE (International Journal of Graduate of Islamic Education)*, 3(1), 134–152. <https://doi.org/10.37567/ijgie.v3i1.1185>
- Maharani, S. D., Surono, S., Zubaidi, A., & Sutarmanto, H. (2019). Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(2), 277. <https://doi.org/10.22146/jkn.31823>
- Manshur, F. M., & Husni, H. (2020). Promoting Religious Moderation through Literary-based Learning: A Quasi-Experimental Study. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(6), 5849–5855.
- Mardhani, D. (2020). Security And Defence Dalam Studi Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 10(3), 279. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v10i3.862>
- Muid, A., Shofa, A., Kehidupan, P., Desa, M., Ideologi, K., Wonorejo, D., Banyuputih, K., Bondowoso, K., Wonorejo, D., Banyuputih, K., Bondowoso, K., Sosial, F. I., & Malang, U. N. (2022). *Praktik Kehidupan Toleransi di Masyarakat Desa Pancasila dan Implikasinya terhadap Ketahanan Ideologi*. 28(2), 145–160.
- Prajogo, P. N., Hadisancoko, R. E., & Widodo, P. (2017). Peran Strategis Komando Daerah Militer (Kodam) Iv/Diponegoro Dalam Mengatasi Ancaman Terorisme Dan Radikalisme Guna Mendukung Kedaulatan Negara Strategic Role of Regional Military Command (Kodam) Iv/Diponegoro in Overcoming the Threat of Terrorism and Rad. 114 | *Jurnal Manajemen Pertahanan* |, 9(1).
- Qodir, Z. (2018). Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama. *Jurnal Studi Pemuda*, 5(1), 429. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.37127>
- Rizki, L. T., Cahyono, M., & Soesatyo, B. (n.d.). *ALIGNING GOVERNANCE IN STRUCTURING POLICIES FOR THE*. 10–17.
- Rukmana, I. S., Samsuri, S., & Wahidin, D. (2020). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Contoh Nyata Ketahanan Ideologi (Studi di Kampung Pancasila, Dusun Nogosari, Desa Trirenggo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 182. <https://doi.org/10.22146/jkn.53815>
- Sabandar, S. (2023). *Kisah Dusun Susuru di Ciamis, Bukti Toleransi Beragama*.

- <https://www.liputan6.com/regional/read/5402608/kisah-dusun-susuru-di-ciamis-bukti-toleransi-beragama>.
- Samosir, A. R., Sianturi, R. P., & Kakunsi, E. (2022). Gereja dan krisis kebebasan beragama di Indonesia. *Kurios*, 8(2), 355–369. <https://doi.org/10.30995/kur.v8i2.583>
- Sanusi, I., & Muhaemin, E. (2019). Intoleransi Keagamaan Dalam Framing Surat Kabar Kompas. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 17–34. <https://doi.org/10.15575/cjik.v3i1.5034>
- Siagian, S. B. U. (2020). Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menangani Intoleransi Di Indonesia. *Jurnal Teologi Biblika*, 5(1), 36–45. <https://doi.org/10.48125/jtb.v5i1.23>
- Sumadi. (2024). *Kampung Kerukunan Ciamis, Bukti Toleransi Umat Beragama*. <https://dispar.ciamiskab.go.id/2024/01/11/kampung-kerukunan-ciamis-bukti-toleransi-antar-umat-beragama/>.
- Wiratomo, G. H., Suprayogi, S., Kristiono, N., & ... (2022). Pemantapan Ketahanan Ideologi Pancasila Bagi Warga Negara Muda Melalui Sekolah Politik Pancasila. *Jurnal ...*, 61–70. <https://ejournal.stkippacitan.ac.id/index.php/baksoka/article/view/428>
- Yunas, N. S., Susanti, A., & Izana, N. N. (2023). Kampung Pancasila dan Upaya Membangun Ketahanan Ideologi Pancasila di Era Society 5.0 (Studi Kampung Pancasila Desa Kebonagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang). *Journal of Civics and Moral Studies*, 8(1), 10–20. <https://doi.org/10.26740/jcms.v8n1.p10-20>